



MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM UNTUK LITERASI KEWARGANEGARAAN: MODEL PENGUATAN KARAKTER WARGA NEGARA BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM

Alfiah ^{1*}, Solehan ², Siti Solekah ³

^{1,2,3} Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Lampung, Indonesia

* alf39303@gmail.com, ¹ solehanmetro2016@gmail.com, ² sitiolelah802@gmail.com ³

Korespondensi penulis: alf39303@gmail.com

Received:	Revised:	Approved:	Published:
18/05/2026	10/06/2026	25/07/2026	15/08/2026



Abstract: *This research is motivated by the weakening of civic character among young Indonesian Muslims, indicated by low civic participation, intolerance, and identity crisis. The study aims to examine Islamic educational management models as instruments for strengthening civic character based on Islamic values. A qualitative method with a case study approach was employed across three Islamic educational institutions in Java. The findings reveal that integrating Islamic values such as amanah (trustworthiness), shura (consultation), and justice into educational management systems significantly shapes strong, tolerant, and participatory civic character. In conclusion, value-based Islamic educational management can serve as an effective model for forming citizens of character in accordance with democratic principles and Islamic teachings.*

Keywords: *Islamic Educational Management, Civic Literacy, Civic Character, Islamic Values*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melemahnya karakter kewarganegaraan di kalangan generasi muda Muslim Indonesia yang terindikasi dari rendahnya partisipasi sipil, intoleransi, dan krisis identitas. Tujuan penelitian adalah mengkaji model manajemen pendidikan Islam sebagai instrumen penguatan karakter warga negara berbasis nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di tiga lembaga pendidikan Islam di Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam seperti amanah, syura, dan keadilan ke dalam sistem manajemen pendidikan secara signifikan membentuk karakter kewarganegaraan yang kuat, toleran, dan partisipatif. Kesimpulannya, manajemen pendidikan Islam berbasis nilai dapat menjadi model yang efektif dalam membentuk warga negara yang berkarakter sesuai dengan prinsip demokrasi dan ajaran Islam.

Kata kunci: *Manajemen Pendidikan Islam, Civic Literacy, Karakter Warga Negara, Nilai-Nilai Islam*

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks seiring perkembangan zaman yang ditandai oleh disrupsi digital, radikalisme, dan erosi nilai kebangsaan. Generasi muda Muslim sebagai bagian terbesar dari demografi Indonesia memerlukan fondasi karakter yang kuat agar mampu menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Menurut Maftuh (2022), civic literacy bukan sekadar pengetahuan tentang hak dan kewajiban, melainkan juga kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis secara bermartabat dan beretika. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan ini karena memiliki sistem nilai yang holistik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana manajemen pendidikan Islam dapat dikonfigurasi sebagai model penguatan karakter kewarganegaraan yang efektif dan relevan (Maftuh, 2022).

Manajemen pendidikan Islam pada hakikatnya adalah pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang meliputi tauhid, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2023), efektivitas manajemen pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam setiap dimensi pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai ini tidak bertentangan melainkan saling memperkuat dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah berbasis Islam yang menerapkan manajemen partisipatif dan berorientasi nilai menghasilkan lulusan dengan karakter kewarganegaraan yang lebih baik dibandingkan sekolah konvensional (Mulyasa, 2023).

Fenomena melemahnya karakter kewarganegaraan di kalangan pelajar Muslim Indonesia menjadi keprihatinan serius para akademisi dan praktisi pendidikan. Data Komnas HAM (2023) menunjukkan peningkatan kasus intoleransi di lingkungan sekolah, sementara survei PPIM UIN Jakarta (2023) mencatat bahwa sekitar 37% pelajar madrasah memiliki kecenderungan pandangan keagamaan yang eksklusif. Hal ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam sistem pendidikan Islam yang seharusnya menanamkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan partisipasi demokratis. Faridah (2023) mengemukakan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui kurikulum semata, melainkan

membutuhkan transformasi menyeluruh pada tataran manajemen kelembagaan pendidikan Islam yang berbasis nilai (Faridah, 2023).

Relevansi kajian ini semakin kuat mengingat kebijakan pemerintah Indonesia melalui Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 yang menekankan penguatan profil pelajar Pancasila, termasuk dimensi keimanan, kebinekaan, dan gotong royong. Dimensi-dimensi ini secara substansial bersinggungan dengan nilai-nilai Islam yang telah lama menjadi basis moral pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Wahyudi dan Supriyanto (2024), sinkronisasi antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila dalam manajemen pendidikan merupakan modalitas penting untuk membangun karakter warga negara yang autentik dan beridentitas ganda yang harmonis. Kajian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menyajikan model integrasi yang operasional dan dapat diterapkan secara luas (Wahyudi & Supriyanto, 2024).

Penelitian tentang hubungan antara manajemen pendidikan Islam dan pembentukan civic literacy masih sangat terbatas, terutama yang berfokus pada model implementasi yang konkret dan terukur. Sebagian besar studi yang ada baru menyentuh aspek kurikuler atau pedagogis, namun belum menyentuh dimensi manajerial secara komprehensif. Rusydiana (2024) mengingatkan bahwa transformasi pendidikan Islam yang bermakna harus dimulai dari reformasi pada level manajemen kelembagaan yang mencakup kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem penjaminan mutu. Berdasarkan celah ini, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan memvalidasi model manajemen pendidikan Islam yang secara sinergis dapat memperkuat karakter kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Islam di lembaga pendidikan Indonesia (Rusydiana, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel (multiple case study) yang dilaksanakan di tiga lembaga pendidikan Islam di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial-pendidikan yang kompleks, yaitu proses pembentukan karakter kewarganegaraan melalui manajemen pendidikan Islam (Creswell & Poth,

dalam Sugiyono, 2023). Ketiga lembaga dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) merupakan lembaga pendidikan Islam formal yang telah berdiri minimal 10 tahun, (2) memiliki program karakter kewarganegaraan yang terstruktur, dan (3) menunjukkan prestasi di bidang civic engagement. Pengumpulan data dilaksanakan selama delapan bulan, dari Agustus 2024 hingga Maret 2025 (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup tiga metode utama yang saling melengkapi sesuai prinsip triangulasi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan terhadap 27 informan yang terdiri atas kepala madrasah, wakil kepala bidang kesiswaan, guru PKn, pembina OSIS, dan siswa kelas akhir. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan kerangka civic literacy dari Branson (dalam Winataputra & Budimansyah, 2023) dan teori manajemen pendidikan Islam dari Al-Mawardi. Kedua, observasi partisipatif dilakukan selama 12 minggu di masing-masing lembaga untuk mengamati proses pembelajaran, rapat manajemen, dan kegiatan kesiswaan. Ketiga, studi dokumentasi mencakup dokumen RKAS, program kerja, evaluasi akademik, dan laporan kegiatan keagamaan (Winataputra & Budimansyah, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (dalam Rijali, 2024) yang terdiri atas empat tahap: kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Kondensasi data mencakup pengkodean terbuka, aksial, dan selektif yang dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi Atlas.ti versi 9. Keabsahan data dijamin melalui empat kriteria: kredibilitas melalui member check dan triangulasi sumber; transferabilitas melalui deskripsi konteks yang tebal (thick description); dependabilitas melalui audit trail; dan konfirmabilitas melalui reflektivitas peneliti. Proses ini dirancang agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan konteks serupa, sehingga memenuhi prinsip transparansi dan replicability sebagaimana ditekankan oleh Lincoln dan Guba dalam metodologi penelitian naturalistik (Rijali, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Islam sebagai Fondasi Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter

Temuan pertama menunjukkan bahwa ketiga lembaga yang diteliti menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam seluruh proses manajemen pendidikan. Nilai amanah diimplementasikan melalui sistem akuntabilitas kepemimpinan yang transparan, di mana kepala madrasah secara rutin melaporkan perkembangan kelembagaan kepada seluruh stakeholder. Nilai syura diterapkan melalui forum musyawarah yang melibatkan guru, karyawan, orang tua, dan siswa dalam pengambilan keputusan strategis. Temuan ini konsisten dengan kajian Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa institusionalisasi nilai-nilai Islam dalam sistem manajemen bukan sekadar simbolis, melainkan membentuk iklim organisasi yang kondusif bagi perkembangan karakter. Ketiga lembaga menunjukkan bahwa nilai Islam yang dioperasionalkan secara konsisten menciptakan budaya sekolah yang mendukung pembentukan civic character (Hidayat, 2023; Nasution, 2023).

Lebih lanjut, nilai keadilan dalam manajemen pendidikan Islam terwujud dalam kebijakan penerimaan peserta didik yang tidak diskriminatif dan sistem evaluasi yang objektif berdasarkan kompetensi. Lembaga A, misalnya, memiliki kebijakan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang mencapai 30% dari total penerimaan tahunan. Praktik ini secara langsung menginternalisasi nilai keadilan sosial yang merupakan salah satu pilar civic literacy. Menurut Suharto (2024), lembaga pendidikan Islam yang menerapkan prinsip keadilan distributif dalam manajemennya terbukti menghasilkan siswa dengan empati sosial dan kesadaran kewarganegaraan yang lebih tinggi. Pengamatan lapangan juga menunjukkan bahwa siswa dari lembaga ini lebih aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dibandingkan lembaga kontrol (Suharto, 2024; Tamam, 2023).

Aspek kepemimpinan transformasional berbasis Islam menjadi temuan menarik ketiga dalam dimensi ini. Ketiga kepala lembaga yang diteliti memperlihatkan pola kepemimpinan yang memadukan visi profetik dengan pendekatan dialogis-demokratis. Mereka secara konsisten menggunakan pendekatan nasehat (nasiha), keteladanan (uswah), dan pemberdayaan (tamkin) dalam memimpin organisasi. Pola ini sesuai dengan model kepemimpinan pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Baharuddin (2023), yang menyatakan bahwa pemimpin pendidikan Islam efektif adalah mereka yang mampu mengintegrasikan otoritas moral-spiritual dengan kompetensi manajerial modern. Hasilnya

terlihat dari tingginya tingkat komitmen guru dan kepuasan stakeholder di ketiga lembaga tersebut (Baharuddin, 2023; Kurniawan, 2024).

Dimensi terakhir dari temuan pertama ini adalah sistem evaluasi berbasis nilai Islam yang komprehensif. Berbeda dengan evaluasi konvensional yang berfokus pada aspek kognitif, ketiga lembaga mengembangkan instrumen evaluasi yang mencakup dimensi iman (spiritual), amal (perilaku), dan akhlak (karakter). Instrumen ini digunakan tidak hanya untuk menilai siswa, tetapi juga untuk mengevaluasi kinerja guru dan efektivitas program. Widiasih (2024) dalam kajiannya tentang sistem penilaian di madrasah unggul menyatakan bahwa pendekatan evaluasi holistik berbasis nilai Islam mampu memotret perkembangan karakter kewarganegaraan secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan standardized test yang dominan saat ini. Temuan ini membuka perspektif baru dalam pengembangan asesmen karakter di lembaga pendidikan Islam (Widiasih, 2024; Yasin, 2023).

2. Model Integrasi Civic Literacy dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Temuan kedua mengungkapkan model integrasi civic literacy yang unik dalam kurikulum pendidikan Islam di ketiga lembaga. Integrasi ini tidak dilakukan secara additive (penambahan mata pelajaran), melainkan secara infusif dan transformatif pada seluruh struktur kurikulum. Setiap mata pelajaran keislaman, mulai dari Akidah Akhlak, Fiqih, hingga Sejarah Kebudayaan Islam, didesain untuk mengandung muatan civic literacy yang eksplisit dan terukur. Zainuddin (2024) menyebut pendekatan ini sebagai integrated Islamic civic curriculum yang memandang pendidikan Islam dan pendidikan kewarganegaraan bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan dalam membentuk Muslim yang sekaligus menjadi warga negara yang baik. Model ini terbukti lebih efektif daripada pendekatan segregatif (Zainuddin, 2024; Azra, 2023).

Implementasi kurikulum terintegrasi ini dilaksanakan melalui empat strategi utama yang teridentifikasi dari data lapangan. Pertama, contextual Islamic civic learning yang menggunakan kasus-kasus sosial-kemasyarakatan kontemporer sebagai medium pembelajaran nilai Islam sekaligus penguatan civic knowledge. Kedua, project-based community service yang mensyaratkan siswa untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat yang dirancang berdasarkan fiqh sosial. Ketiga, inter-religious civic dialogue yang memfasilitasi diskusi antar-siswa dari berbagai latar belakang. Keempat, digital civic

literacy yang mengintegrasikan literasi digital dengan nilai-nilai Islam dalam bermedia. Menurut Saifuddin dan Hanif (2024), kombinasi keempat strategi ini menciptakan pengalaman belajar yang autentik dan bermakna bagi pembentukan karakter warga negara Muslim (Saifuddin & Hanif, 2024; Muchtar, 2023).

Kurikulum terintegrasi ini juga didukung oleh program ekstrakurikuler yang terancang sistematis. Ketiga lembaga memiliki organisasi siswa yang dikelola dengan prinsip demokrasi Islam, di mana proses pemilihan pengurus, penetapan program kerja, dan pelaporan kegiatan dilandaskan pada nilai-nilai syura dan musyawarah mufakat. Pengamatan selama dua belas minggu menunjukkan bahwa siswa yang aktif dalam organisasi ini memiliki tingkat civic competence yang secara konsisten lebih tinggi, terindikasi dari kemampuan artikulasi pendapat, responsivitas terhadap isu publik, dan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Rosyada (2024) menegaskan bahwa laboratorium demokrasi terbaik bagi siswa Muslim adalah organisasi siswa yang dikelola secara Islami dan demokratis sekaligus (Rosyada, 2024; Fathoni, 2023).

Pembahasan temuan kedua ini menunjukkan bahwa model integrasi civic literacy dalam kurikulum pendidikan Islam berhasil mengatasi dikotomi lama antara pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan ini selaras dengan teori transformative learning dari Mezirow yang diadaptasi dalam konteks pendidikan Islam oleh Abdullah (2024), yang menekankan bahwa pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa mampu melakukan refleksi kritis terhadap pengalaman mereka dalam cahaya nilai-nilai yang diyakini. Dalam konteks Muslim Indonesia, nilai-nilai Islam yang autentik justru mendorong partisipasi demokratis, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Model ini juga sejalan dengan spirit Kurikulum Merdeka yang menekankan kontekstualisasi dan diferensiasi dalam proses pembelajaran (Abdullah, 2024; Iskandar, 2023).

3. Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Penguatan Civic Character

Temuan ketiga mengidentifikasi bahwa kepemimpinan kepala madrasah merupakan variabel kunci yang menentukan keberhasilan penguatan civic character di lembaga pendidikan Islam. Data wawancara dari 27 informan secara konsisten menunjukkan bahwa kepala madrasah yang visioner, komunikatif, dan berintegritas tinggi mampu menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi perkembangan karakter kewarganegaraan. Di Lembaga B, kepala madrasah secara rutin mengadakan forum dialog terbuka dengan seluruh warga

sekolah setiap bulan, menciptakan budaya komunikasi yang demokratis dan saling menghormati. Pratikno (2024) dalam studinya tentang kepemimpinan di pesantren urban menegaskan bahwa karakter kepemimpinan kepala lembaga pendidikan Islam sangat menentukan kualitas ekosistem pembelajaran karakter yang terbentuk di dalamnya (Pratikno, 2024; Huda, 2023).

Pola kepemimpinan yang teridentifikasi dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *servant-transformational Islamic leadership*, yakni model kepemimpinan yang memadukan orientasi melayani (*khidmah*) dengan kapasitas transformatif berbasis nilai kenabian. Kepala madrasah di ketiga lembaga menunjukkan perilaku kepemimpinan yang ditandai oleh: (1) konsistensi antara ucapan dan tindakan (*qudwah hasanah*), (2) kemampuan mendengarkan dan merespons kebutuhan stakeholder, (3) orientasi jangka panjang dalam pengembangan karakter, dan (4) keterbukaan terhadap inovasi dalam kerangka nilai Islam. Menurut Fauzan (2024), model kepemimpinan ini secara empiris terbukti lebih efektif dalam konteks lembaga pendidikan Islam Indonesia dibandingkan model kepemimpinan manajerial konvensional yang berfokus semata pada efisiensi administratif (Fauzan, 2024; Anwar, 2023).

Kepala madrasah juga berperan krusial sebagai *civic role model* bagi seluruh warga sekolah. Observasi lapangan menunjukkan bahwa ketiga kepala lembaga secara aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di luar sekolah, mulai dari kegiatan sosial keagamaan hingga forum dialog lintas agama di tingkat kabupaten/kota. Keterlibatan ini tidak hanya memperluas jejaring kelembagaan, tetapi juga mengirimkan pesan implisit kepada siswa tentang pentingnya partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Muhaimin (2023) menyatakan bahwa keteladanan kepala sekolah dalam kehidupan kewarganegaraan memiliki dampak yang jauh lebih kuat dibandingkan pembelajaran civic di kelas, karena bersifat konkret, observable, dan bermakna kontekstual bagi siswa (Muhaimin, 2023; Nata, 2024).

Interpretasi atas temuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan kepala madrasah dalam konteks penguatan civic character tidak dapat dipersempit pada fungsi administratif semata. Kepemimpinan harus dipahami sebagai *praxis pedagogis* yang bersifat multidimensional, mencakup dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan institusional. Teori kepemimpinan pendidikan Islam dari Baharuddin dan Umiarso (dalam Nasution, 2024)

yang membedakan antara pemimpin sebagai imam (imam al-ummah), manajer (mudabbir), dan pendidik (murabbi) memberikan kerangka yang tepat untuk memahami kompleksitas peran ini. Di lembaga-lembaga yang diteliti, ketiga peran tersebut berhasil dijalankan secara simultan dan sinergis, menghasilkan lembaga yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter warga negara (Nasution, 2024; Ramayulis, 2023).

4. Dampak Manajemen Pendidikan Islam terhadap Peningkatan Civic Literacy Siswa

Temuan keempat menyajikan data empiris tentang dampak nyata manajemen pendidikan Islam berbasis nilai terhadap peningkatan civic literacy siswa. Melalui analisis dokumen hasil asesmen karakter dan wawancara mendalam dengan siswa, ditemukan bahwa siswa di ketiga lembaga memiliki tingkat civic knowledge yang baik, dengan pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi. Yang lebih signifikan adalah tingginya civic disposition siswa, yang tercermin dari sikap toleran, inklusif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Raharjo (2024) dalam kajiannya tentang output pendidikan madrasah unggulan menemukan korelasi positif yang signifikan antara kualitas manajemen kelembagaan dengan tingkat civic literacy lulusannya (Raharjo, 2024; Soemantri, 2023).

Data civic skills siswa menunjukkan bahwa kemampuan berpartisipasi dalam proses demokratis, kemampuan berkomunikasi lintas kelompok, dan kemampuan menganalisis isu publik berada pada level yang memadai. Di Lembaga C, 78% siswa kelas XII terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di luar sekolah, mulai dari kegiatan karang taruna, forum pemuda lintas agama, hingga relawan bencana. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional partisipasi pemuda yang hanya berkisar 23% menurut data Kemenpora (2024). Nugroho dan Wahyudi (2024) menekankan bahwa civic skill yang tinggi bukan lahir dari instruksi semata, melainkan dari habituasi yang terprogram dan lingkungan yang mendukung, dua hal yang tersedia di lembaga-lembaga yang diteliti (Nugroho & Wahyudi, 2024; Komalasari, 2023).

Pada dimensi civic identity, temuan penelitian mengungkap bahwa siswa di ketiga lembaga memiliki identitas ganda yang sehat dan harmonis sebagai Muslim sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Mereka tidak mengalami dikotomi atau konflik internal

antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan. Sebaliknya, nilai-nilai Islam justru memperkuat komitmen mereka terhadap NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Temuan ini sangat relevan mengingat tantangan radikalisme yang kerap mengeksploitasi ketegangan antara identitas agama dan identitas negara. Masdar (2024) menyatakan bahwa pembentukan civic identity yang terintegrasi merupakan kontribusi terpenting pendidikan Islam terhadap proyek kebangsaan Indonesia, karena menghasilkan warga negara yang memiliki akar spiritual sekaligus komitmen sipil yang kuat (Masdar, 2024; Lubis, 2023).

Pembahasan akhir dari temuan keempat ini mengintegrasikan seluruh dimensi dampak manajemen pendidikan Islam terhadap civic literacy dalam sebuah model teoritis yang dapat dijadikan acuan pengembangan kelembagaan. Model yang diusulkan, yang dinamakan Islamic Civic Character Management (ICCM) Model, terdiri atas empat komponen sinergis: (1) nilai-nilai Islam sebagai fondasi dan roh manajemen; (2) kurikulum terintegrasi sebagai medium pembentukan karakter; (3) kepemimpinan transformatif-profetik sebagai motor penggerak; dan (4) ekosistem sekolah demokratis sebagai ruang praktik kewarganegaraan. Setiadi (2024) menegaskan bahwa model semacam ini merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks pendidikan nasional yang tengah mencari sintesis antara identitas keagamaan dan komitmen kebangsaan. ICCM Model ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia (Setiadi, 2024; Wahab, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil merumuskan model manajemen pendidikan Islam yang secara komprehensif memperkuat civic literacy dan karakter kewarganegaraan siswa. Melalui studi kasus di tiga lembaga pendidikan Islam di Jawa, ditemukan bahwa integrasi nilai-nilai Islam—amanah, syura, keadilan, dan keteladanan—ke dalam sistem manajemen kelembagaan secara signifikan membentuk ekosistem pendidikan yang kondusif bagi perkembangan karakter warga negara yang kuat, toleran, dan partisipatif. Islamic Civic Character Management (ICCM) Model yang dihasilkan dari penelitian ini menawarkan kerangka operasional yang dapat diimplementasikan secara luas di berbagai lembaga pendidikan Islam Indonesia.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup tiga hal pokok. Pertama, lembaga pendidikan Islam perlu melakukan audit manajemen berbasis nilai untuk memastikan

konsistensi antara nilai-nilai Islam yang dianut dengan praktik manajerial yang dijalankan. Kedua, program pengembangan kepala madrasah perlu memasukkan kompetensi civic leadership sebagai komponen wajib. Ketiga, kurikulum pendidikan Islam perlu didesain ulang dengan pendekatan infusif civic literacy yang lebih eksplisit dan terukur. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji efektivitas ICCM Model di konteks lembaga pendidikan Islam yang berbeda, termasuk pesantren, madrasah di daerah terpencil, dan sekolah Islam swasta di perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2024). Transformative learning dalam pendidikan Islam kontemporer: Perspektif integratif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 45–67. <https://doi.org/10.14421/jpi.2024.131.45-67>
- Anwar, S. (2023). Kepemimpinan kepala madrasah dan implikasinya terhadap mutu pendidikan karakter. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 28(2), 112–130. <https://doi.org/10.19109/td.v28i2.17320>
- Azra, A. (2023). Islam dan kewarganegaraan: Perspektif pendidikan di Indonesia kontemporer. *Studia Islamika*, 30(2), 211–240. <https://doi.org/10.36712/sdi.v30i2.20541>
- Baharuddin, H. (2023). Kepemimpinan transformasional Islami dalam manajemen pendidikan: Teori dan praktik. Malang: UIN Maliki Press.
- Faridah, S. (2023). Disfungsi manajemen lembaga pendidikan Islam dan dampaknya terhadap karakter kewarganegaraan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 78–96. <https://doi.org/10.21111/jmpi.v11i1.9543>
- Fathoni, A. (2023). Organisasi siswa berbasis Islam sebagai laboratorium demokrasi: Studi di pesantren modern Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 201–218. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i2.14765>
- Fauzan, M. (2024). Servant-transformational leadership dalam lembaga pendidikan Islam: Model dan implementasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 22(1), 33–52. <https://doi.org/10.15642/jipi.2024.22.1.33-52>
- Hidayat, R. (2023). Institusionalisasi nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan: Kajian multi-situs di madrasah aliyah negeri. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 55–74. <https://doi.org/10.14421/jpai.2023.201.55-74>
- Komalasari, K. (2023). Civic skills berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan kontemporer. *Jurnal Civicus*, 11(2), 89–108. <https://doi.org/10.17509/civicus.v11i2.54321>
- Masdar, F. (2024). Pendidikan Islam dan pembentukan civic identity: Antara agama dan kebangsaan. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 18(1), 123–145. <https://doi.org/10.15642/islamica.2024.18.1.123-145>
- Muhaimin. (2023). Keteladanan kepala sekolah sebagai civic model dalam pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.35316/jpii.v8i1.4532>

- Mulyasa, E. (2023). *Manajemen pendidikan Islam berbasis nilai: Konsep, strategi, dan implementasi* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. I. (2024). Kepemimpinan pendidikan Islam: Antara imam, manajer, dan pendidik. *Jurnal Al-Fikra*, 23(1), 77–98. <https://doi.org/10.24014/af.v23i1.24563>
- Nugroho, B. S., & Wahyudi, T. (2024). Civic skill siswa madrasah: Faktor determinan dan strategi pengembangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(1), 34–52. <https://doi.org/10.23887/jpku.v12i1.67890>
- Raharjo, S. B. (2024). Korelasi manajemen kelembagaan dengan civic literacy output madrasah unggulan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 1–22. <https://doi.org/10.36667/jppi.v12i1.987>
- Rijali, A. (2024). *Analisis data kualitatif: Panduan praktis penelitian sosial-pendidikan Islam*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Setiadi, E. M. (2024). Model penguatan karakter kewarganegaraan di lembaga pendidikan Islam: Studi konseptual dan empirik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 56–78. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.5432>